

ABSTRAK

Pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu cara terbaik untuk membantu tumbuh kembang bayi karena ASI mengandung semua zat gizi dan mengandung antibodi untuk membangun kekebalan tubuh bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif berdasarkan analisis segitiga kebijakan di UPTD Puskesmas Kuta II.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan menerapkan teknik *purposive sampling* sebanyak tujuh informan yang terdiri dari pemegang program gizi, koordinator layanan KIA, bidan dan kader posyandu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor kebijakan yang terlibat adalah Camat, penyuluh pertanian, TPPKK Kecamatan Kuta, PLKB, Kepala Puskesmas, petugas gizi, petugas imunisasi, bidan, kader dan tokoh masyarakat; konten kebijakan sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2016; konteks kebijakan dari sisi sosial budaya ada dukungan dari lembaga adat, dari sisi ekonomi keluarga banyak tergolong mampu mengkonsumsi makanan bergizi sejak hamil; proses melibatkan langkah identifikasi permasalahan, pengimplementasian, monitoring dan evaluasi.

Kesimpulannya, keempat aspek (aktor, konten, konteks, proses) sudah berjalan sesuai dengan rencana. Terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan implementasi kebijakan ASI eksklusif. Perlu dilakukan rapat koordinasi secara berkala, disediakan ruang laktasi pada tempat-tempat kerja, dan sistem catatan pelaporan agar menggunakan sistem IT.

Kata Kunci: Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Implementasi Kebijakan, Segitiga Kebijakan

ABSTRACT

Exclusive breastfeeding is one of the best ways to help a baby's growth and development because breast milk contains all nutrients and antibodies to build immunity. This study aims to determine the implementation of exclusive breastfeeding policies based on the policy triangle analysis at UPTD Puskesmas Kuta II.

This type of research is descriptive qualitative research. Informant determination was carried out by applying the purposive sampling technique to as many as seven informants, consisting of nutrition program holders, MCH service coordinators, midwives, and posyandu cadres. Data collection was conducted using in-depth interviews.

The results revealed that the policy actors involved included the Head of Sub-district, agricultural extension workers, Kuta region TPPKK, PLKB, Head of Puskesmas, nutrition officers, immunization officers, midwives, cadres, and community leaders. The policy content aligned with the Regional Regulation of Badung Regency Number 12 of 2016. From a socio-cultural perspective, customary institutions provided support. From an economic perspective, many families were classified as being able to consume nutritious food since pregnancy. The process involved problem identification, implementation, monitoring, and evaluation steps.

In conclusion, the four aspects (actors, content, context, process) have gone according to plan. There are several issues that must be addressed in order to improve the implementation of the exclusive breastfeeding policy. Regular coordination meetings are required, lactation rooms are provided at workplaces, and an IT system should be used in the reporting record system.

Keywords: *Exclusive Breastfeeding, Policy Implementation, Policy Triangle*